

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kementerian Hukum terhadap notaris di Indonesia, serta untuk menganalisis akibat hukum yang timbul apabila notaris tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur-literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Hukum memiliki peran strategis dalam pengaturan, pelantikan, pengawasan, dan pembinaan terhadap jabatan notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta peraturan pelaksanaannya. Namun dalam implementasinya, pelaksanaan peran tersebut tidak selalu berjalan optimal. Hambatan yang muncul antara lain adalah terbatasnya sumber daya dalam pengawasan, kurangnya kepatuhan notaris terhadap mekanisme pembinaan, serta lemahnya sistem sanksi administratif yang belum memberikan efek jera. Selain itu, ketidakhadiran notaris dalam proses pelantikan atau penolakan terhadap pengawasan dan pembinaan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan peran Kementerian Hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pembinaan dan pengawasan yang lebih sistematis, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, serta penegakan sanksi yang lebih tegas agar profesi notaris dapat berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan integritas jabatan.

**Kata Kunci: Kementerian Hukum, Notaris, Pengawasan, Pelantikan, Pembinaan, Sanksi**

## ***ABSTRACT***

This study aims to examine the role of the Ministry of Law in relation to notaries in Indonesia, as well as to analyze the legal consequences that arise when notaries fail to comply with the provisions established by the Ministry. This research uses a normative juridical approach with secondary data sources obtained from legislation, legal doctrines, and relevant literature. The results show that the Ministry of Law holds a strategic role in regulating, appointing, supervising, and guiding notaries, as regulated under Law Number 2 of 2014 concerning the Office of Notary and its implementing regulations. However, in practice, the implementation of these roles is not always optimal. Several obstacles are encountered, such as limited human resources in supervision, lack of notarial compliance with development mechanisms, and the weakness of the administrative sanction system which has yet to create a deterrent effect. Additionally, the absence of notaries during inauguration processes or refusal to be supervised and guided poses its own challenges. Therefore, it is necessary to strengthen a more systematic system of development and supervision, improve the capacity of supervisory institutions, and enforce stricter sanctions so that the notarial profession operates in accordance with the principles of legal certainty and professional integrity.

**Keywords: Ministry of Law, Notary, Supervision, Appointment, Development, Sanctions**